

STRATEGI PENERAPAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) PADA SMA NEGERI DENGAN ZONASI SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Farid Kusuma

NPP. 32.0689

Asdaf Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat

Program Studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat

Email: 32.0689@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Aleknaek Martua, M.E.

ABSTRACT

Problem Statement: The zoning-based PPDB system in Indonesia aims to equalize access to public senior high schools and reduce regional disparities in educational quality. However, uneven school distribution, infrastructure constraints, and community resistance continue to challenge its effectiveness. **Purpose:** This study analyzes the strategies employed by the Education Office in implementing zoning regulations and evaluates their impact on community empowerment, particularly in improving the Human Development Index (HDI) in the education sector. **Method:** Employing an explanatory sequential design, data were collected through interviews, observations, and document analysis. **Result:** Key strategies include optimizing an IT-based zoning system, enhancing policy transparency and dissemination, and fostering multi-stakeholder collaboration in inclusive educational planning. These actions have improved educational access for marginalized groups and bolstered community participation in school development. **Conclusion:** The success of the zoning-based PPDB hinges on adequate educational infrastructure and active community involvement. Recommendations include refining zoning validation mechanisms, constructing schools in underserved (“blankspot”) areas, and strengthening government-community synergy for a more equitable educational ecosystem.

Keywords: Education Office Strategy; Student Admission; Zoning; Community Empowerment; Human Development Index

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang: PPDB jalur zonasi bertujuan pemeratakan akses SMA negeri dan menurunkan kesenjangan mutu pendidikan antardaerah. Kendala utama adalah distribusi sekolah yang tidak merata, keterbatasan infrastruktur, serta resistensi masyarakat. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi Dinas Pendidikan dalam mengimplementasikan zonasi serta mengevaluasi dampaknya terhadap pemberdayaan masyarakat dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di bidang pendidikan. **Metode:** Desain explain-sequential dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Strategi utama meliputi optimalisasi zonasi berbasis TI, peningkatan transparansi dan sosialisasi kebijakan, serta kolaborasi lintas

pemangku kepentingan. Hasilnya, akses pendidikan bagi kelompok marjinal meningkat dan partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas sekolah tumbuh signifikan. **Kesimpulan:** Keberhasilan PPDB zonasi sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur dan keterlibatan aktif masyarakat. Rekomendasi meliputi penyempurnaan validasi zonasi, pembangunan sekolah di area blankspot, dan penguatan sinergi pemerintah-masyarakat untuk pendidikan yang lebih adil.

Kata Kunci: Strategi Dinas Pendidikan; Penerimaan Peserta Didik Baru; Zonasi; Pemberdayaan Masyarakat; Indeks Pembangunan Manusia

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan adalah fondasi utama dalam meningkatkan IPM yang mencakup aspek kesehatan, pendapatan, dan pendidikan. Sejak 2017, PPDB jalur zonasi diterapkan untuk mendekatkan sekolah negeri ke masyarakat menengah ke bawah dan mengurangi eksklusivitas. Namun di Kota Pontianak, jumlah SMA negeri masih terpusat di beberapa kecamatan, sementara permintaan terus meningkat, sehingga kualitas pendidikan perlu ditingkatkan. Peningkatan kualitas pendidikan menjadi pondasi penting dalam mempersiapkan Indonesia menghadapi persaingan yang kompetitif dan dinamis (Alek, 2022), dari aspek tersebut, memerlukan investasi di bidang pendidikan dalam berbagai aspek. Peningkatan investasi dalam pendidikan penting karena berkontribusi terhadap pengembangan sumber daya manusia terutama dalam pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (Moser & Rubensfein, 2002). Didukung juga dari pendapat Benlaria (2025) yang berpendapat bahwa Peningkatan investasi dalam pendidikan berkontribusi pada pengembangan sumber daya manusia, yang mana hal tersebut penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Fenomena ini memotivasi penulis untuk melakukan penelitian yang merumuskan strategi prioritas dalam penerapan zonasi guna mendorong pemerataan pendidikan dan peningkatan IPM.

Keberadaan sistem zonasi pada dasarnya diharapkan dapat menjadi jalan masyarakat kelompok menengah kebawah untuk mampu memperoleh pendidikan gratis lewat sekolah negeri, sehingga masyarakat kelompok tersebut tidak perlu terbebani oleh biaya yang akan dikeluarkan bila mendaftarkan anaknya di sekolah swasta (Hubaib & Biantary, 2022). Pada kenyataannya pelaksanaan PPDB masih belum maksimal di Kota Pontianak karena dalam prosesnya terjadi permasalahan seperti kurangnya transparansi dan sosialisasi. Sehingga dalam pelaksanaannya juga ditemukan empat masalah yang memperburuk pelaksanaan sistem zonasi, yaitu rentan *blankspot* serta ketidaksesuaian titik koordinat, adanya manipulasi serta pemalsuan dokumen kependudukan, tidak semua penyelenggara melakukan pembagian zonasi, dan belum ada mekanisme validasi dalam seleksi zonasi (Purwanti et al., 2018).

Permasalahan yang dihadapi mendorong adanya strategi dan usaha yang menjadi prioritas dalam menghadapi fenomena yang terjadi, sehingga dapat diperoleh hasil yang diharapkan, yaitu optimalnya partisipasi pendidikan di masyarakat yang tidak hanya berfokus pada perbaikan sistem pendidikan, tetapi juga pada penguatan kapasitas masyarakat. Peningkatan kualitas pendidikan diharapkan dapat meningkat dalam berbagai aspek pendidikan pada aspek perkembangan dan pelatihan sebagai wujud peningkatna sumber daya manusia (Sholihah & Lambelanova, 2023).

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Jika dilihat dari lokasi geografisnya, saat ini Kota Pontianak sendiri merupakan Kota yang cukup luas dengan pembangunan yang berbasis pada perairan, yang dalam kasus ini adalah keberadaan Sungai Kapuas yang menjadi elemen embrio tradisional dalam pembentukan ruang kota di Pontianak (Nurhidayati & Arianti, 2021). Ini menjadi alasan terdapat beberapa kesenjangan yang mempengaruhi efektivitas penerapan PPDB zonasi di

Kota Pontianak. Pertama, distribusi SMA Negeri masih terpusat pada tiga kecamatan, sehingga calon peserta didik dari lima kecamatan lainnya terpaksa mendaftar dengan jarak sekolah negeri yang cukup jauh dengan persangan yang ketat. Kedua, infrastruktur di wilayah terluar belum memadai. Ketiga, resistensi masyarakat muncul karena kebijakan zonasi dipersepsikan memaksa siswa mendaftar ke sekolah yang seadanya di daerahnya dan jauh dari sekolah unggulan, sementara sosialisasi kebijakan hingga kini belum menjangkau kelompok rentan sehingga orang tua belum sepenuhnya memahami mekanisme zonasi. Keempat, kolaborasi antara Dinas Pendidikan dan sekolah mekanisme yang mengintegrasikan pendampingan, dan evaluasi berkelanjutan.

Permasalahan ini berujung pada banyak orangtua yang memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikan anaknya ke jenjang SMA karena ketersediaan SMA Negeri di daerah tempat tinggal dan tidak memiliki biaya untuk mendaftar ke sekolah swasta. Beberapa kasus bahkan dari siswa itu sendiri yang tidak mau melanjutkan sekolahnya akibat tidak bisa mendaftar ke sekolah yang diimpikan, hal ini menunjukkan bahwa belum terlaksananya keadilan dalam memperoleh pendidikan yang berdasarkan pendapat Guohua et al., (2024) Keadilan dalam proses pendidikan berarti bahwa siswa memiliki peluang yang sama untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman di sekolah, termasuk tidak hanya perolehan pengetahuan yang jelas seperti prestasi akademik, tetapi juga peluang bagi pemimpin mahasiswa untuk belajar dan berlatih. Fenomena ini menghambat fungsi dari pendidikan yang berdasarkan pendapat Marthalina (2018) yaitu pendidikan merupakan penggarap dan penghasil SDM unggul sebagai jembatan di dalam menghasilkan produk berkualitas untuk mampu berkompetisi di pasar global.

Angka partisipasi murni berdasarkan data badan pusat statistik pada tingkat SMA di Kota Pontianak masih stagnan di angka 61% dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dan indeks Pembangunan manusia pada dimensi pendidikan juga mengalami stagnansi karena rata-rata lama sekolah yang tidak bertambah yang mana permasalahan ini akan berpengaruh pada kualitas SDM Kota Pontianak kedepannya. Karena pendidikan diharapkan dapat mengembangkan kemampuan yang pada penguasaan kondisi terkini seperti sistem informasi, manajemen, *big data*, dan kecerdasan buatan (AI) untuk memastikan bahwa masyarakat dapat meningkatkan kualitas mereka.

1.3 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya telah menjadi pijakan bagi penelitian ini, baik dalam konteks PPDB zonasi, pemerataan pendidikan, strategi dan penerapan AHP. Arba (2019) mengevaluasi dampak persebaran populasi usia sekolah terhadap penerimaan siswa baru melalui sistem zonasi di Kebumen dan menemukan bahwa ketimpangan distribusi penduduk menyebabkan sekolah tidak mampu memenuhi kuota siswa dengan merata. Chandra (2023) meneliti implementasi kebijakan zonasi PPDB SMA di Kota Tarakan, mengidentifikasi kendala sosialisasi dan validasi data yang masih manual. Theresia et al., (2024) menganalisis kinerja Dinas Pendidikan Kota Medan dalam penerapan zonasi, menunjukkan perlunya mekanisme monitoring yang lebih terstruktur. Saharuddin & Khakim, (2020) menyoroti kendala implementasi zonasi di DIY, khususnya terkait transparansi dan dokumentasi kebijakan. Sementara itu, penulis juga menganalisis penelitian dari Susilowati et al., (2013) sebagai acuan dan Gambaran penulis dalam menggunakan AHP yang mana dalam penelitian ini AHP berfungsi untuk merancang strategi peningkatan kompetensi guru, walaupun objek penelitiannya berbeda, menegaskan keefektifan AHP dalam menentukan prioritas kebijakan pendidikan. Peneliti juga menganalisa artikel dari Kholifah (2022) dalam menerapkan strategi yang dapat dilandaskan pada skripsi penulis.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki keunikan dibandingkan studi terdahulu dengan menerapkan pendekatan *exploratory sequential design* yang menggabungkan penggalan kualitatif mendalam berdasarkan pendapat Prof. Lexy J. Moleong (2017) dan analisis kuantitatif menggunakan AHP berdasarkan dari Saaty (2012) yang dikombinasikan untuk merumuskan prioritas strategi PPDB zonasi. Selain itu, penelitian ini secara langsung mengaitkan perumusan strategi dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di bidang pendidikan di Kota Pontianak—suatu kaitan yang belum pernah dibahas secara terukur dalam literatur sebelumnya, yang umumnya hanya bersifat deskriptif tanpa analisis prioritas dan dampak terhadap IPM.

1.5 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan strategi prioritas serta indikator-indikator kunci yang mendasari strategi dalam upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia bidang pendidikan melalui pelaksanaan PPDB jalur zonasi di SMA Negeri Kota Pontianak.

II. METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan *exploratory sequential mixed methods* yang diawali dengan eksplorasi kualitatif berdasarkan Prof. Lexy J. Moleong (2017) melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi untuk menggali faktor-faktor strategis dalam penerapan PPDB jalur zonasi. Temuan kualitatif tersebut kemudian dijadikan dasar penyusunan instrumen kuantitatif berupa kuesioner *Analytic Hierarchy Process* (AHP) berdasarkan pendapat Saaty (2012) yang disebarakan kepada 15 responden untuk memberikan bobot dan memprioritaskan strategi berdasarkan kriteria terukur. Integrasi hasil kualitatif dan kuantitatif disajikan secara sistematis, sehingga menghasilkan pemahaman kontekstual sekaligus validitas numerik terhadap strategi yang diusulkan. Data primer diperoleh dari wawancara, observasi proses PPDB zonasi, serta kuesioner AHP.

Data sekunder diperoleh dari dokumentasi resmi Dinas Pendidikan dan peraturan terkait. Instrumen penelitian meliputi pedoman wawancara semi-terstruktur, kuesioner AHP dengan skala perbandingan berpasangan, dan lembar dokumentasi kebijakan. Teknik pengumpulan data terdiri atas wawancara, observasi, dokumentasi, serta penyebaran kuesioner. Analisis data kualitatif menggunakan reduksi, penyajian, dan verifikasi data Miles dan Huberman, sedangkan data kuantitatif dianalisis melalui *Analytic Hierarchy Process* untuk menentukan bobot dan perankingan strategi. Penelitian dilaksanakan di Kota Pontianak pada periode Desember 2024 - Januari 2025, dengan jadwal kegiatan terstruktur dan lokus penelitian mencakup kantor Dinas Pendidikan serta beberapa SMA Negeri terpilih sesuai zonasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis strategi penerapan penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada SMA Negeri dengan zonasi sebagai upaya peningkatan indeks pembangunan manusia di kota Pontianak, berdasarkan pendapat Eskandar (2024) bahwa dibutuhkan regulasi yang tepat untuk meningkatkan kualitas lulusan sekolah, memungkinkan mereka untuk beradaptasi dengan tantangan global yang berkembang yang melibatkan analisis menyeluruh terhadap sistem saat ini untuk mengidentifikasi kekurangan dan menentukan area yang memerlukan perbaikan, serta pengembangan kompetensi yang dibutuhkan. Penulis sendiri menganalisis skripsi ini menggunakan teori David (2013) yang menyatakan bahwa proses terbentuknya sebuah strategi memiliki 3 tahap, yaitu perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi, dan juga penggunaan AHP yang terdiri dari 2 level hierarki. Pembahasan tersebut dapat terlihat pada subbab berikut.

3.1 Perumusan Strategi

Perumusan strategi dalam pelaksanaan PPDB jalur zonasi difokuskan untuk menyusun kebijakan yang adil, berkelanjutan, dan sesuai karakteristik sosial-geografis Kota Pontianak. Berdasarkan teori David (2013), tiga dimensi strategi—perumusan, implementasi, dan evaluasi—dimulai dari tahap perumusan, yakni penetapan visi/misi, sasaran, serta mekanisme operasional PPDB. Hasil wawancara pada 19 Januari 2025 dengan Linda Asniah selaku Ketua Pelaksana PPDB, menjelaskan prosedur perumusan kebijakan:

- **Platform dan regulasi:** Pengumuman, pendaftaran, dan seleksi dipublikasikan melalui website PPDB Dikbud Kalbar, berpedoman pada Permendikbud No. 21/2021. Jalur zonasi diberi kuota 50 %, dengan perhitungan jarak menggunakan aplikasi PPDB berbasis GIS dan data Dukcapil.
- **Kriteria seleksi:** Prioritas diberikan calon peserta berdomisili terdekat, diikuti umur tertua, dan waktu pendaftaran paling awal.
- **Penyesuaian kapasitas:** Rencana penambahan ruang kelas di sekolah padat atau pembangunan sekolah baru, dengan pertimbangan dampak pada sekolah swasta dan kesinambungan sistem pembelajaran jam pagi–siang .

Dengan dasar data administratif dan studi dokumen, kebijakan zonasi dirumuskan agar menjamin pemerataan akses bagi semua calon peserta didik, mengantisipasi ketimpangan fasilitas antar-zona, menyediakan landasan hukum dan teknis yang transparan sejak awal. Dalam tahap perencanaan PPDB zonasi, partisipasi pemangku kepentingan terlihat dari keterlibatan aktif dinas Pendidikan, kepala sekolah, komite sekolah, dan perwakilan orang tua dalam forum koordinasi dan lokakarya zonasi. Dari tujuh informan kunci—termasuk pejabat Dinas dan kepala SMA—semua menyatakan bahwa mereka rutin menghadiri rapat perencanaan kebijakan zonasi, memberikan masukan terkait peta zonasi dan kuota program, serta meninjau ulang mekanisme penetapan zona berdasarkan data kependudukan dan kapasitas sekolah.

3.2 Implementasi Strategi

Tahap implementasi adalah upaya konkret memindahkan kebijakan dari perencanaan ke tindakan di lapangan. Dalam konteks PPDB zonasi, fokus implementasi meliputi penyiapan infrastruktur digital, sosialisasi, dan manajemen alur pendaftaran.

- **Infrastruktur dan sistem:** Seluruh proses pendaftaran dijalankan daring melalui sistem terintegrasi dengan Dukcapil dan peta GIS, sehingga verifikasi data domisili dan perhitungan jarak dapat berlangsung otomatis.
- **Sosialisasi dan pelatihan SDM:** Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar mengarahkan tiap sekolah untuk menyosialisasikan mekanisme zonasi kepada orang tua dan siswa sejak Juli.
- **Prosedur operasional:**
 1. Calon peserta membuat akun di portal PPDB Kalbar.
 2. Melengkapi dokumen persyaratan sesuai jalur zonasi.
 3. Hasil seleksi diumumkan di akun masing-masing; sanggah dikelola oleh admin kabupaten/kota.
 4. Daftar ulang dilakukan di sekolah penerima dengan verifikasi dokumen fisik.

Berdasarkan wawancara pada 8 Januari 2025 dengan M. Ali Romdion selaku Kepala SMA Negeri 7 Pontianak, dan M. Faruq Azhar selaku Guru SMA Negeri 9 Pontianak pada tanggal 9 Januari 2025, alur pendaftaran online telah berjalan lancar, meski efektivitas sangat bergantung pada kesiapan jaringan dan kemampuan petugas sekolah dalam membantu orang tua memanfaatkan sistem.

3.3 Evaluasi Strategi

Evaluasi strategi menjadi langkah krusial untuk mengidentifikasi keberhasilan dan kendala pelaksanaan PPDB zonasi, sekaligus pembelajaran untuk perbaikan kebijakan selanjutnya.

- **Posisi evaluasi dalam AHP:** Hasil perhitungan Expert Choice menempatkan kriteria “Evaluasi Strategi” pada prioritas tertinggi dengan bobot 0,409, mengindikasikan pentingnya belajar dari pelaksanaan sebelumnya .
- **Mekanisme evaluasi:**
 1. **Monitoring berkala** atas realisasi pendaftaran dan serapan daya tampung.
 2. **Verifikasi dokumen** untuk mendeteksi manipulasi data domisili.
 3. **Analisis kesenjangan kualitas** antar-sekolah berdasarkan hasil ujian nasional dan survei kepuasan orang tua.
 4. **Sosialisasi umpan balik** melalui forum orang tua, guru, dan pemangku kebijakan.

Dari wawancara Linda Asniah, terungkap bahwa “Antusias warga tinggi, tetapi kapasitas kelas terbatas; evaluasi perlu mendorong solusi pembagian shift belajar atau perluasan daya tampung yang lebih fleksibel” Dengan demikian, evaluasi tidak hanya menilai jalannya prosedur, tetapi juga menjadi dasar rekomendasi penambahan sarana, revisi kuota, dan peningkatan transparansi sistem PPDB zonasi.

3.4 Uraian Hierarki AHP Level 1

Pada level pertama hierarki AHP, struktur dibangun mulai dari **Goal**—yakni “Strategi Penerapan PPDB Jalur Zonasi sebagai Upaya Peningkatan IPM Bidang Pendidikan di Kota Pontianak”—diikuti oleh tiga **kriteria** utama berdasarkan dimensi teori strategi David (2013).

No.	Kriteria	Bobot	CR
1	Evaluasi Strategi	0,409	0,05
2	Perumusan Strategi	0,351	0,05
3	Implementasi Strategi	0,240	0,05

1. Evaluasi Strategi (0,409)

Menempati bobot tertinggi karena menjadi proses “belajardari pelaksanaan sebelumnya”, dimana kesalahan dan kekurangan dalam perencanaan dan implementasi PPDB zonasi diidentifikasi, dianalisis, dan dijadikan dasar perbaikan kebijakan mendatang. Evaluasi meliputi monitoring real time, verifikasi dokumen domisili, dan umpan balik masyarakat melalui forum orang tua serta guru.

2. Perumusan Strategi (0,351)

Berfokus pada penyusunan visi-misi, analisis SWOT, penetapan kuota zonasi (50 %), penggunaan GIS dan data Dukcapil untuk perhitungan jarak, serta rencana penambahan ruang kelas atau sekolah baru untuk mengantisipasi ketimpangan fasilitas. Proses ini menjamin kebijakan zonasi berbasis data dan transparan sejak awal

3. Implementasi Strategi (0,240)

Meliputi penyiapan infrastruktur digital (portal PPDB terintegrasi GIS–Dukcapil), sosialisasi ke sekolah dan masyarakat, serta manajemen alur pendaftaran (akun online, sanggah, dan daftar ulang). Efektivitas implementasi sangat dipengaruhi kesiapan jaringan dan kapasitas SDM sekolah dalam membantu orang tua siswa

3.5 Uraian Hierarki AHP Level 1

Level kedua hierarki mengurutkan **alternatif strategi** yang akan diambil untuk mencapai goal, dengan hasil perhitungan Expert Choice sebagai berikut:

No.	Alternatif	Bobot	CR
1	Optimalisasi Infrastruktur Pendidikan	0,440	0,02
2	Evaluasi Peraturan & Komposisi Penerimaan PPDB	0,319	0,02
3	Peningkatan Transparansi & Validasi Data PPDB	0,240	0,02

1. **Optimalisasi Infrastruktur Pendidikan (0,440)**

Alternatif tertinggi karena pilar teknis zonasi sangat bergantung pada ketersediaan dan pemerataan fasilitas. Dengan pemerataan ruang kelas, laboratorium, dan sarana prasarana, tekanan pada sekolah favorit dapat dikurangi dan distribusi peserta didik menjadi lebih merata. Selain itu, infrastruktur yang memadai mendukung kelancaran implementasi sistem online dan verifikasi dokumen

2. **Evaluasi Peraturan & Komposisi Penerimaan PPDB (0,319)**

Meliputi peninjauan kuota zonasi, afirmasi, dan prestasi, serta revisi kebijakan sesuai dinamika lapangan—misalnya menyesuaikan proporsi jalur zonasi agar tetap responsif terhadap pertumbuhan penduduk per kecamatan. Hal ini penting untuk menjaga keselarasan regulasi dengan kondisi sosial-geografis dan mencegah ketimpangan akses

3. **Peningkatan Transparansi & Validasi Data PPDB (0,240)**

Fokus pada verifikasi dokumen domisili, penggunaan sistem digital untuk meminimalkan manipulasi data, serta publikasi real-time hasil seleksi untuk memperkuat kepercayaan publik. Meskipun bersifat teknis, transparansi menjadi pondasi legitimasi kebijakan zonasi dan mendukung keberhasilan evaluasi serta implementasi

3.6 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Sama halnya dengan Arba (2019) yang menyoroti pentingnya kolaborasi pemangku kepentingan dalam zonasi PPDB, penelitian ini juga menemukan bahwa sinergi Dinas, sekolah, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan. Berbeda dengan Chandra (2023) yang masih menemui kendala sosialisasi manual di Tarakan, platform daring di Pontianak mengurangi kesalahan verifikasi alamat hingga 30%. Temuan AHP menempatkan evaluasi strategi sebagai prioritas tertinggi (bobot 0,409), menegaskan bahwa pembelajaran berkelanjutan dari pelaksanaan sebelumnya sangat krusial untuk menyesuaikan kebijakan zonasi.

Penelitian ini mengidentifikasi tiga temuan kunci dalam upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia melalui PPDB jalur zonasi di Kota Pontianak: prioritas evaluasi strategi, kebutuhan optimalisasi infrastruktur pendidikan, dan pentingnya peningkatan transparansi serta validasi data.

1. **Prioritas Evaluasi Strategi**

Hasil AHP menempatkan “Evaluasi Strategi” sebagai kriteria tertinggi (bobot tertinggi), menegaskan perlunya mekanisme monitoring dan umpan balik yang berkelanjutan dalam pelaksanaan PPDB zonasi. Sama halnya dengan pendapat Van Meter dan Van Horn, bahwa efektivitas kebijakan publik sangat bergantung pada kualitas sistem evaluasi dan pelaporan, sehingga temuan ini memperkuat urgensi monitoring secara berkala serta langkah-langkah korektif dalam kebijakan zonasi.

2. **Optimalisasi Infrastruktur Pendidikan**

Sebagai alternatif program paling prioritas, penelitian menyoroti pembangunan dan pemerataan fasilitas sekolah di setiap zona untuk mengatasi overkapasitas dan kesenjangan fasilitas. Temuan ini sejalan dengan studi Susilowati et al. (2013) yang menggunakan AHP dalam konteks peningkatan kompetensi guru dengan menekankan pentingnya sarana dan prasarana sebagai pilar utama peningkatan kualitas pendidikan. Perbedaannya, penelitian ini menerapkan AHP pada konteks PPDB zonasi di SMA Negeri Pontianak, bukan pada kompetensi guru di SMP Negeri Tegal.

3. **Peningkatan Transparansi dan Validasi Data**

Kebutuhan validasi data domisili dan transparansi proses pendaftaran muncul sebagai temuan penting untuk mencegah manipulasi data. Temuan ini mendukung temuan Saharuddin dan Khakim yang mengkritik kurangnya verifikasi dalam sistem zonasi di Daerah Istimewa Yogyakarta, namun penelitian tersebut tidak mengadopsi AHP. Penelitian ini menambahkan sudut pandang kuantitatif berbasis AHP untuk menentukan bobot prioritas mitigasi risiko manipulasi data dalam PPDB.

Dengan demikian, diskusi temuan utama ini tidak hanya menegaskan prioritas internal kebijakan PPDB zonasi, tetapi juga menempatkannya dalam kerangka penelitian terdahulu, menunjukkan kesamaan metodologis sekaligus perbedaan konteks dan fokus studi

3.5 **Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Penulis menemukan beberapa faktor yang menjadi permasalahan yang menghambat terlaksananya strategi PPDB di tingkat SMA Negeri secara maksimal, yaitu masih banyaknya masyarakat yang memegang stigma sekolah favorit sehingga menganggap sekolah yang bukan merupakan sekolah favorit tidak memiliki kualitas dan kemampuan mendidik anak, berdasarkan wawancara dengan Dr. Safei pada tanggal 7 Januari 2025, beliau menyampaikan SMA Negeri 11 merupakan sekolah baru di Kota Pontianak sehingga masyarakat belum yakin akan kualitasnya, sehingga murid yang mendaftar di SMA 11 melalui zonasi terkesan terpaksa yang tergambar dari banyaknya murid yang pindah dan berhenti bersekolah setelah 1 semester, total ada 65 murid yang berhenti dan pindah sekolah lain dalam kurun waktu 2022-2024.

IV. **KESIMPULAN**

Penulis memperoleh Kesimpulan bahwa berdasarkan masih terdapat permasalahan yang terjadi di berbagai aspek dan tahap pelaksanaan dalam pelaksanaan PPDB di tingkat SMA Negeri sehingga berpengaruh pada angka IPM Kota Pontianak sehingga memerlukan beberapa penyesuaian, penulis juga melakukan analisis lebih mendalam terkait hal tersebut melalui Teknik AHP, evaluasi strategi menjadi dimensi strategi yang paling diharapkan dengan bobot tertinggi dalam perhitungan AHP berdasarkan penilaian dari seluruh informan karena dianggap dapat memastikan bahwa sistem zonasi berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan pemerataan pendidikan, serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan kebijakan.

Optimalisasi infrastruktur menjadi prioritas alternatif yang paling tinggi berdasarkan perhitungan AHP dari semua informan, hal ini sendiri didasari dari fungsi infrastruktur yang dianggap paling efektif dalam menangani permasalahan yang terjadi pada PPDB di Kota Pontianak. Berdasarkan hasil tersebut evaluasi terhadap pelaksanaan yang sudah dilakukan sebelumnya dan mengoptimalkan infrastruktur yang ada adalah Langkah yang disarankan untuk dilakukan para pemangku kebijakan untuk menghadapi PPDB tingkat SMA Negeri kedepan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yaitu waktu dan ketersediaan data terbaru yang mendukung, penelitian juga hanya dilakukan pada lingkup SMA

Negeri saja, tidak mencakup sekolah di tingkat setara lain yaitu SMK, MA serta sekolah khusus yang ada di Kota Pontianak sebagai studi kasus yang diteliti

Arah Masa Depan Penelitian (Future Work). Penulis memahami bahwa temuan yang dihasilkan belum sepenuhnya menyeluruh berkaitan dengan beberapa aspek yang belum dimasukkan dalam penelitian, maka dari itu penulis berharap dapat dilakukan penelitian lebih lanjut terkait topik yang dibahas di Kota Pontianak dengan lebih menyeluruh untuk memperoleh hasil yang lebih akurat dan mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis sampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, Kepala SMA Negeri se-Kota Pontianak, para responden, serta semua pihak yang mendukung terlaksananya penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Alek. (2022). Peningkatan Kualitas Pendidikan Untuk Mencetak Sumber Daya Manusia Berkualitas Menuju Indonesia Unggul. *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 1.
- Arba, D. (2019). DAMPAK PERSEBARAN POPULASI PENDUDUK USIA SEKOLAH TERHADAP PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU MELALUI SISTEM ZONASI DI KABUPATEN KEBUMEN. In *e-conversion - Proposal for a Cluster of Excellence*.
- Benlaria, H. (2025). Does Education Spending Affect Energy Consumption in Saudi Arabia? A Bootstrap Causality Test. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 15(1), 36–46. <https://doi.org/10.32479/ijeep.17481>
- Chandra, A. (2023). *Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat SMA Negeri Tahun Ajaran 2021/2022 di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara*. 9.
- David, F. R. (2013). *Strategic Management* (13th Edition). Prentice Hall.
- Eskandar. (2024). VOCATIONAL EDUCATION CURRICULUM DEVELOPMENT POLICY COMPETENCY-BASED AT INSTITUTE OF HOME AFFAIRS GOVERNANCE. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan* 3(1), 26–42. <https://doi.org/10.33701/jkp.v7i2.4723>
- Guohua, Z., Jingyan, Z., & Wenwen, W. (2024). *Does Family Background Affect the Experience of College Student Leaders?*. *Sage Open*, June, 1–10. <https://doi.org/10.1177/21582440241245499>
- Hubaib, F., & Biantary, M. P. (2022). Manfaat Dan Dampak Perubahan Kebijakan Jalur Zonasi Pada Ppdb 2020/2021. *Dedikasi*, 23(1), 51. <https://doi.org/10.31293/ddk.v23i1.6422>
- Kholifah, A. (2022). Strategi Pendidikan Pesantren Menjawab Tantangan Sosial di Era Digital. *Jurnal Basicedu*. <https://journal.uui.ac.id/ajie/article/view/971>

- Marthalina. (2018). Analisis Kualitas Pelayanan Akademik Dan Kepuasan Mahasiswa Di Ipdn Kampus Jakarta. *Jurnal MSDM*, 5, 1–18.
- Moser, M., & Rubensfein, R. (2002). The equality of public school district funding in the United States: A national status report. *Public Administration Review*, 62(1), 63–72. <https://doi.org/10.1111/1540-6210.00155>
- Nurhidayati, E., & Arianti, I. (2021). Perkembangan Kota Berbasis Perairan Di Pontianak. *Jurnal Ilmiah Arsitektur*, 11(1), 1–8. <https://doi.org/10.32699/jiars.v11i1.1578>
- Prof. Lexy J. Moleong, M. . (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif*. rosdakarya offset.
- Purwanti, D., Irawati, I., & Adiwisastro, J. (2018). Efektivitas kebijakan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi bagi siswa rawan melanjutkan pendidikan. *Dinamika*, 5(4), 1–7.
- Saaty, T. L. (2012). *Models, Methods, Concepts & Applications of the Analytic Hierarchy Process* (Second Edi). Springer.
- Saharuddin, E., & Khakim, M. S. (2020). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Tingkat Sma Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 7(3), 424–438. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/4226>
- Sholihah, L., & Lambelanova, R. (2023). Model Pengembangan Kompetensi Dosen Pada Fakultas Politik Pemerintahan Di Institut Pemerintahan Dalam Negeri *VISIONER: Jurnal*, 1–12. <https://www.ejournal.goacademica.com/index.php/jv/article/download/686/632>
- Susilowati, I., Arif Sutanto, H., Daharti, R., & Bank BPD Jateng Permalink, S. (2013). Strategi Peningkatan Kompetensi Guru Dengan Pendekatan Analysis Hierarchy Process. *Jejak*, 6(1), 80–92. <https://doi.org/10.15294/jejak.v6i1.3750>
- Theresia, G., Sagala, B., & Nasution, M. A. (2024). Kinerja Dinas Pendidikan Kota Medan Atas Penerapan Kebijakan Sistem Zonasi dalam Upaya Pemerataan Pendidikan di Kecamatan Medan Baru. *Jurnal Pendidikan Tambusai 10508*, 8(1), 10508–10529.